

BAB V

KESIMPULAN

Sangat sulit untuk menentukan kapan sebuah konflik benar-benar akan berakhir. Tidak jarang sebuah kesepakatan damai berekor pada konflik baru yang tak kalah dahsyatnya. Perdamaian yang akhirnya ingin diraih ternyata menciptakan janin resistensi yang siap menjadi “brutus” dan membunuh induknya, perdamaian itu sendiri. Hal seperti ini telah menjadi cerita usang di dalam risalah perang dan damai, bahkan dijadikan hukum besi dari kelompok ilmuwan realis, “Bukankah perdamaian yang lebih bertahan lama seringkali dihasilkan dari kemenangan secara militer dibandingkan dengan negosiasi damai?”

Terobosan baru perdamaian yang telah lama berhasil dicapai di Mindanao, yakni melalui 1996 *Final Peace Agreement* selain menimbulkan harapan juga memberikan “pekerjaan rumah” yang tidak ringan. Mengingat dari beberapa catatan menunjukkan bahwa konflik internal yang akut yang diakhiri oleh penyelesaian yang dinegosiasikan tampaknya lebih mungkin menuju ke keadaan terjadinya lagi konflik bersenjata dibandingkan dengan konflik yang diakhiri oleh kemenangan militer. Catatan ini menunjukkan perlunya melanjutkan usaha penciptaan perdamaian di Mindanao secara lebih sungguh-sungguh. Beberapa hambatan yang mungkin akan muncul dari upaya transformasi konflik seperti

juga yang sering terjadi di berbagai wilayah konflik lainnya adalah adanya kemungkinan beberapa kelompok yang masih memandang kekerasan dari berlanjutnya konflik sebagai keuntungan, memandang perang sebagai jalan hidup dan sumber ekonomi dan pendapatan yang dapat mereka kuasai. Untuk protagonis seperti ini, perdamaian dapat mengakibatkan kehilangan peran atau status yang secara langsung mengancam kepentingan mereka. Di sisi lain, kejenuhan masyarakat terhadap kekerasan yang selalu terjadi juga merupakan potensi besar yang dapat dikembangkan bagi penciptaan perdamaian di Mindanao.

Agar dapat mengklarifikasikan apa yang menjadi persoalan di Mindanao, akan sangat membantu untuk memahami definisi Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan tentang “pembangunan perdamaian sebagai beragam tindakan bersama dan terintegrasi untuk mengkonsolidasikan perdamaian dan mencegah konfrontasi bersenjata”.¹³⁶ Akan tetapi ini merupakan tugas yang tidak mudah bagi para aktifis perdamaian di Mindanao, tantangan untuk mencegah terulangnya lagi sebuah perang, kemudian pada tantangan untuk mengkontruksikan perdamaian yang dipertahankan sendiri oleh pihak-pihak yang bertikai.

Merujuk pada SOP *United Nations*, hal utama yang harus dilakukan adalah “mengidentifikasi dan mendukung struktur yang cenderung memperkuat dan

memperkokoh perdamaian agar dapat menghindari berulangnya sebuah konflik”. Pertama hal ini diidentifikasi dengan demobilisasi kekuatan militer kedua belah pihak yang dapat dimulai dengan sebuah kesepakatan formal dan implementatif dalam semangat penghentian permusuhan bagi jaminan keamanan perdamaian.

Sekali lagi, ini merupakan langkah yang sangat berat mengingat tidak ada mekanisme yang dapat mengontrol sepenuhnya “petempur” di lapangan. Mungkin yang sangat dibutuhkan adalah sebuah sikap baik untuk menjunjung perdamaian dari para pemegang senjata tersebut, selain sanksi yang tegas untuk mencegah sikap “kekanak-kanakan” yang mungkin timbul dari egoisme militer. Untuk itu, tiga ciri “intrinsik” berikut dianggap penting sebagai pendukung: pergeseran cara persoalan konflik oleh pihak-pihak yang bertikai sehingga tampak bahwa kepentingan dipenuhi dengan penyelesaian damai ketimbang dengan perang; politik internal pihak-pihak yang bertikai di mana “mereka yang berpihak pada perdamaian” lebih kuat ketimbang “mereka yang berpihak pada perang”, ini menjadi penting untuk menyelaraskan sikap antara institusi-institusi lembaga negara di Manila dan perpanjangan tangannya di ARMM bagi kesepahaman perilaku mewujudkan perdamaian; keseimbangan kekuatan militer di lapangan, sehingga “perang yang menemui jalan buntu” akan mempercepat akomodasi, di mana dimungkinkan juga bahwa di antara dua di antara mereka, satu pihak akan

selama ini yang hanya mengandalkan pola-pola militer; selanjutnya adalah “mengkonstruksikan perdamaian yang dapat mempertahankan dirinya sendiri”.

Kapan konflik di Mindanao akan berakhir? Adalah pertanyaan yang pasti untuk jawaban yang sering tak pernah pasti di wilayah konflik. “Berakhir” sendiri adalah sebuah momentum yang paradoksal dari keabadian perubahan waktu dan kejadian yang tidak pernah berhenti pada titik “akhir” rangkaian. Apa yang merupakan pengakhiran konflik kekerasan atau perang sebenarnya juga merupakan pertanyaan yang menjebak. Beberapa analis menggunakan definisi minimal yakni tidak ada kekerasan bersenjata terjadi pada tahun berikutnya; tetapi penyelesaian damai seringkali dilanggar dan kekerasan lanjutan terjadi. Kamboja yang menghasilkan sebuah “penyelesaian politik yang komprehensif” pada tahun 1990, sekali lagi menjadi ajang konflik dengan intensitas tinggi pada akhir tahun 1996.

Sebuah akhir di dalam konflik tidak selalu merupakan momen yang tepat waktu tetapi merupakan sebuah proses, yang berakhir ketika dispensasi politik baru telah berlaku atau pihak-pihak berdamai, atau sebuah konflik baru mereda. Akan tetapi konflik bersenjata pada akhirnya benar-benar berakhir dengan mengambil periode waktu yang cukup panjang. Karena itu, kesepakatan damai adalah bukan akhir dari sebuah konflik, tetapi sarana yang dengannya pihak-pihak

terselesaikan atau sarana melalui mana mereka berharap untuk menang, meskipun tidak lagi dilakukan dengan kekuatan militer. Jadi, sekali lagi jalan masih panjang dan sulit untuk sebuah “everlasting peace” di Mindanao.

Namun, di antara jalan yang panjang dan sulit tersebut, muncul sebuah angin segar bagi *conflict resolution method* di Mindanao, yakni melalui GiNaPaLaD TaKa Space for Peace dan Sanctuaries for Peace di Pikit, North Cotabato yang merupakan derivat dari *human security*. Sebagaimana yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, kedua pusat perdamaian pragmatis ini memiliki karakter yang sama dengan *human security* yaitu bersifat universal, memiliki komponen yang saling berkaitan, pencegahan merupakan langkah terbaik dalam pencapaian tujuan serta berbasis pada penduduk (*people-centered*).

Di sisi lain, kedua pusat perdamaian pragmatis ini telah membuktikan efektifitasnya dalam membangun keamanan kemanusiaan sekaligus menjadi *conflict resolution method* di Mindanao karena memenuhi indikator efektifitas yang telah disusun sebelumnya, yakni memenuhi kebutuhan dasar, adanya stabilitas mata pencaharian, adanya pembangunan berkelanjutan, serta adanya proses pengembangan perdamaian yang meliputi penciptaan *good governance*, pemberdayaan, kesetaraan dan kebebasan, serta menghormati, menegakan hukum dan pelaksanaan asas keadilan.

Meskipun, mengutip Ed Garcia dari International Alert, “human security is still reluctant, remembering there is no substantive peace policy that could provide guidelines on the issues required to build a just and durable peace”, namun pembuktian dari hipotesa menunjukkan bahwa GiNaPaLaD TaKa Space for Peace dan Sanctuaries for Peace di Pikit, North Cotabato efektif dalam membangun *human security* dalam konflik di Mindanao, sebagaimana ditegaskan oleh Tabang Mindanaw, bahwa

The task of rehabilitating the war-torn areas in Mindanao, *as well as establishing human security*, is more than just a project. It is a *mission* that promotes healing, reconciliation and unity among Christians, Lumads, and Muslims. It is a *journey* of displaced people who struggle together in rebuilding their lives and their community from ashes of war. It is a *commitment* of people who continually search for a genuine and lasting peace in Mindanao.

Pendekatan *human security* menjadi sangat relevan karena sebelumnya konflik di Mindanao lebih dominan dengan pendekatan *state security*, dimana pihak yang berkonflik memandang Mindanao secara dikhotomi sehingga kekerasan menjadi satu-satunya instrumen *conflict resolution method* yang pada saat bersamaan menafikan aspek kemanusiaan. Studi kasus terhadap GiNaPaLaD TaKa Space for Peace dan Sanctuaries for Peace di Mindanao telah membuktikan efektifitas sebuah upaya membangun keamanan kemanusiaan dalam konflik kekerasan. Hal ini dipertegas oleh Tabang Mindanaw, Bishop Partners serta Citizen Peace Council dalam surat yang ditunjukkan kepada Presiden Gloria Macapagal Arroyo

Protection of the state and its sovereignty is a primordial duty of government. The more important duty is the welfare of its people, the protection of their inherent rights as citizens, the respect for human rights and the guarantee of freedoms. The constructive peace advocacy provides heads of state and leaders of the rebellion with alternative peace options. Human Security complements state security; it enhances human rights and strengthens human development. This interlocking synergism is the most effective formula against insurgencies and rebellion. **With a human security framework in place, the people themselves will protect the peace. They will value their own freedoms and there will be no need for rebellion.**

Sehingga, adalah benar ketika Bishop Antonio J. Ledesma, S.J. menulis, "thus, we find that the concept of human security helps those based in Mindanao or